

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004, Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Selain itu Arsyad (Endar, 2014 : 72) mengartikan air sebagai bahan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, hewan dan tanaman yaitu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan, juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Air bersih sangat penting dalam kehidupan manusia. Air bersih membantu kegiatan manusia setiap harinya seperti untuk mencuci, memasak, mandi, dan kegiatan lainnya. Selain itu air bersih juga sangat penting dalam lingkungan bisnis, pertanian, perkebunan, dan juga industri. Dalam penggunaannya sehari-hari, perlu diketahui air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Umumnya syarat tersebut meliputi syarat fisik, kimia, dan biologi.

Kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air yang sebagian besar digunakan untuk air minum saat ini semakin sulit. Setiap negara mengalami krisis air di daerahnya masing-masing karena sumber air tidak tersebar merata di beberapa daerah atau wilayah, kemudian dapat diakibatkan dari musim kemarau yang panjang, pencemaran pada sumber air, semakin penduduk semakin tinggi kebutuhan air, sehingga masyarakat hanya memanfaatkan air sumur, air hujan atau

membeli air bersih, bahkan terpaksa menggunakan air kotor yang menyebabkan banyak terkena penyakit yaitu diare. Maka sistem penyediaan air harus dapat menunjang kebutuhan air minum masyarakat pada seluruh kota. George (Marlina & Mardwi, 2013: 940) menyatakan pada pengembangan sistem penyediaan air bersih yang paling penting adalah mengenai kualitas dan kuantitas air tersebut.

Tabel 1. 1 Proporsi Populasi Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum

Provinsi	Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan Menurut Provinsi (Persen)			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	61.23	63.31	64.85	66.48
Sumatera Utara	71.41	70.61	70.07	71.95
Sumatera Barat	66.58	67.33	68.83	69.53
Riau	74.24	75.49	75.12	79.68
Jambi	62.75	63.23	65.73	66.66
Sumatera Selatan	65.16	63.77	64.02	65.31
Bengkulu	41.08	37.35	43.83	49.37
Lampung	55.06	52.41	53.79	56.78
Kep. Bangka Belitung	68.03	63.95	68.14	66.83
Kep. Riau	84.12	85.31	83.95	83.56
Dki Jakarta	93.40	92.44	88.93	89.59
Jawa Barat	67.20	67.62	70.50	71.06
Jawa Tengah	73.63	76.30	76.09	78.16
Di Yogyakarta	80.99	81.04	77.19	80.62
Jawa Timur	76.64	75.83	75.54	75.20
Banten	67.68	67.47	66.11	72.83
Bali	91.27	88.71	90.85	90.90
Nusa Tenggara Barat	71.70	73.98	70.48	73.61
Nusa Tenggara Timur	62.72	60.04	65.20	72.41
Kalimantan Barat	68.39	66.19	68.77	72.88
Kalimantan Tengah	57.01	61.26	63.90	65.38

Kalimantan Selatan	62.23	58.63	60.62	62.67
Kalimantan Timur	78.13	78.93	82.75	81.26
Kalimantan Utara	84.59	82.69	83.78	88.30
Sulawesi Utara	71.53	70.22	73.29	76.20
Sulawesi Tengah	61.49	62.15	67.10	71.13
Sulawesi Selatan	72.07	73.42	76.34	77.93
Sulawesi Tenggara	77.19	75.82	79.83	80.95
Gorontalo	66.47	71.59	75.00	78.99
Sulawesi Barat	53.89	58.99	60.66	62.98
Maluku	64.96	67.20	68.34	76.47
Maluku Utara	60.07	62.99	65.73	69.17
Papua Barat	68.85	68.76	73.12	77.12
Papua	51.27	52.69	59.09	58.35
Indonesia	70.97	71.14	72.04	73.68
Perkotaan	81.30	81.05	80.82	81.55
Pedesaan	60.58	60.72	62.10	64.18

Sumber: Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan Menurut Provinsi, 2015 – 2018 (BPS)

Sesuai data BPS menunjukkan bahwa akses air minum layak di Indonesia meningkat dari 70,97% pada tahun 2015, 71,14% pada tahun 2016, 72,04% pada tahun 2017, dan meningkat sampai 73,68% pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada tahun 2018 walaupun angka peningkatannya tidak drastis tinggi. Kemudian populasi yang memiliki akses air minum layak pada rumah tangga lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur air minum masih perlu ditingkatkan karena masih banyak sarana dan prasarana air minum tidak terpelihara berkelanjutan.

Sanitasi merupakan usaha untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik pada kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Sanitasi terdiri dari sub sektor

MCK, sampah rumah tangga, drainase dan ketersediaan air bersih. Air bersih dan sanitasi merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan. Jika prasarana dan sarana air minum dan sanitasi tidak memadai, maka akan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Tabel 1. 2 Proporsi Penduduk yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Provinsi	Proporsi Populasi Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan (Persen)			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	54.16	61.02	62.92	67.09
Sumatera Utara	67.18	72.43	72.56	74.60
Sumatera Barat	44.53	52.93	52.56	56.85
Riau	50.77	70.67	69.84	71.48
Jambi	57.81	65.11	64.20	63.99
Sumatera Selatan	61.03	64.51	66.10	68.60
Bengkulu	38.96	49.45	42.54	44.31
Lampung	44.53	58.29	52.78	52.48
Kep. Bangka Belitung	80.13	82.49	83.56	85.64
Kep. Riau	71.38	78.71	85.55	85.07
Dki Jakarta	88.39	90.42	90.37	90.73
Jawa Barat	58.86	63.12	64.02	64.73
Jawa Tengah	66.68	70.19	71.56	74.04
Di Yogyakarta	86.03	85.60	89.14	88.92
Jawa Timur	62.90	67.47	68.60	68.84
Banten	66.24	72.92	71.12	70.65
Bali	84.99	88.74	90.07	91.14
Nusa Tenggara Barat	63.46	69.76	69.08	73.70
Nusa Tenggara Timur	23.37	38.74	43.77	50.72
Kalimantan Barat	39.48	51.46	49.33	53.97
Kalimantan Tengah	35.38	50.30	45.15	52.55
Kalimantan Selatan	59.66	60.71	58.09	62.76

Kalimantan Timur	68.17	75.60	72.36	79.19
Kalimantan Utara	48.09	64.26	66.06	71.75
Sulawesi Utara	64.62	74.75	71.14	75.23
Sulawesi Tengah	54.89	59.76	61.03	64.15
Sulawesi Selatan	71.82	76.05	76.52	79.61
Sulawesi Tenggara	63.29	67.44	69.22	69.90
Gorontalo	54.47	59.38	58.62	64.30
Sulawesi Barat	50.97	59.35	59.48	63.21
Maluku	59.14	66.31	63.02	69.05
Maluku Utara	58.99	64.13	66.14	66.96
Papua Barat	61.63	63.69	64.91	73.95
Papua	27.10	30.97	32.56	33.75
Indonesia	61.57	67.20	67.54	69.27
Perkotaan	75.67	80.16	80.27	80.48
Perdesaan	47.38	53.57	53.15	55.74

Sumber: Proporsi Populasi Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan, 2015 – 2018 (BPS)

Sesuai data BPS, dapat dinyatakan bahwa dalam layanan sanitasi Indonesia mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebanyak 61,57%, pada tahun 2016 67,20%, pada tahun 2017 sebanyak 67,54 dan pada tahun 2018 meningkat sebanyak 69,27%. Akses pelayanan sanitasi mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut dominan terjadi di daerah perkotaan.

Sanitasi yang buruk di Indonesia salah satunya diakibatkan dari perilaku masyarakat yang buang air besar sembarangan, mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan penyakit. Kurangnya persediaan air bersih ternyata membuat sebagian masyarakat tidak sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan untuk menjamin kesehatan bersama. Penyebab lainnya yaitu pemerintah daerah yang masih kurang peduli dan sadar akan pentingnya sanitasi yang layak bagi

kehidupan masyarakat membuat pembangunan sistem sanitasi lambat dan terbengkalai. Sebagian daerah menganggap sanitasi bukan isu yang penting sehingga dana yang tersalurkan untuk penyediaan fasilitas sanitasi sedikit.

Akses air minum dan sanitasi sangat penting dalam menentukan harapan hidup masyarakat karena dengan adanya pembangunan yang layak maka akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat, yaitu akan menurunkan penyakit dan peningkatan angka harapan hidup, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam pelayanan air minum dan sanitasi, karena berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2004 dalam pasal 5 tentang Sumberdaya Air menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu yang mendasar diatur dalam PP tersebut adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab dan wajib untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan air minum yang berkualitas, melalui terbentuknya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs yang merupakan kelanjutan atau pengganti MGDs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia

pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi 2030. Salah satu tujuan yang terdapat dalam SDGs adalah tujuan nomor enam yaitu menjamin ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua masyarakat. Tujuan tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2030 dengan usaha menghentikan buang air besar sembarangan dan memberi perhatian khusus bagi masyarakat yang memerlukannya dan mengurangi polusi, mengurangi pembuangan limbah, serta meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali secara substansial.

Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut berusaha melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memadukan prinsip-prinsip yang benar melalui kebijakan dan program nasional. Salah satu program nasional adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang dilaksanakan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat (Pedoman Pengelolaan Pamsimas, 2013). Dengan adanya keterlibatan dan kepedulian masyarakat merupakan kunci untuk keberlanjutan program PAMSIMAS.

Pendekatan dalam PAMSIMAS melalui proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan ide, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat baik dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat (Pedoman maupun Petunjuk Pelaksanaan Program PAMSIMAS Edisi 2012). Semakin besar kontribusi masyarakat maka semakin tinggi komitmen masyarakat untuk memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Manfaat dari

program PAMSIMAS diharapkan mampu melayani masyarakat yang belum terlayani air bersih yang layak diminum menjadi dapat menikmati dan terfasilitasi dengan baik.

Pelaksanaan Program PAMSIMAS sudah banyak di dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pemilihan Lokasi Pamsimas dipilih pertahun dengan melakukan langkah-langkah seperti melakukan sosialisasi program di kabupaten/kota dan sosialisasi ditingkat desa/kelurahan, selanjutnya musyawarah desa pembentukan tim penyusun proposal dan Kader air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL), Identifikasi masalah dan analisis ssituasi (IMAS) dan penyusunan proposal desa/kelurahan, pengajuan proposal, penerimaan dan pembukaan proposal, verifikasi proposal, penyusunan daftar pendek (short list), pengumuman daftar pendek (short list) dan penetapan daftar desa/kelurahan sasaran.

Kota Semarang merupakan daerah yang ikut ambil andil dan menerima dukungan dana dari program PAMSIMAS. Kota semarang sering terjadi terjangan rob dan banjir dengan drainasenya yang kurang baik yang mengakibatkan terjadi hambatan dalam program PAMSIMAS. Tidak hanya terjangan rob, bencana kekeringan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan PAMSIMAS di Kota Semarang. Hal ini mengakibatkan masih terdapat beberapa kelurahan yang berkategori merah versi PAMSIMAS.

Tabel 1. 3 Kategori Keberfungsian Sarana Air Minum (SAM)

Kategori	Sambungan Rumah	Keterangan
Merah	< 40 %	Tidak berfungsi
Kuning	40 – 80 %	Berfungsi Sebagian
Hijau	> 80 %	Berfungsi Baik

Sumber : Dokumen AP-SPAMS “Tirta Atlas” Kota Semarang

Kategori merah merupakan wilayah dengan program PAMSIMAS dengan SAM tidak berfungsi, dimana hanya mempunyai kurang dari 40 SR. Sedangkan kategori kuning merupakan program PAMSIMAS dengan SAM berfungsi sebagian yaitu 40 sampai 80 SR dan ketegori hijau termasuk pada keberfungsian SAM yang baik yaitu memiliki lebih dari 80 SR.

Tabel 1. 4 BPSPAMS Kelurahan berkategori Merah pada SAM tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama BP SPAMS	Jlh Sr	Opsi	Ket
1	Mijen	Kedungpane	Tirto Wahyu Abadi	-	Sumur dalam	Merah
2	Gunung Pati	Sadeng	Sanggasari	-	Sumur dalam	Merah
3	Banyumanik	Jabungan	Tirtaguna	10	Sumur dangkal	Merah
4	Pedurungan	Kalicari	Griya Tirta sarana	-	Sumur dalam	Merah

Sumber : Dokumen AP-SPAMS “Tirta Atlas” Kota Semarang (2018)

Sesuai dengan data Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Kota Semarang “TIRTA ATLAS”, Kelurahan Jabungan tepatnya di kecamatan Banyumanik termasuk dalam wilayah berkategori merah yang memerlukan bantuan lebih meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kelurahan Jabungan merupakan lokasi pemukiman/perbukitan yang perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan. Kondisi sarana dan prasarananya kurang memadai karena Kelurahan Jabungan memiliki karakteristik kehidupan pedesaan, ini mengindikasikan bahwa permukiman di Kelurahan Jabungan memerlukan perubahan melalui program. Program PAMSIMAS di Kelurahan Jabungan sudah dijalankan sejak tahun 2010, namun hingga saat ini belum dapat menjadi sebuah solusi dari kawasan tersebut. Wilayah kelurahan Jabungan termasuk daerah yang selalu terdampak kekeringan di musim kemarau dan permukaan tanah yang tidak merata mengakibatkan sulitnya mendistribusikan air yang bersih sangat berpengaruh pada sanitasi Kelurahan Jabungan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian berupa evaluasi program PAMSIMAS di Kelurahan Jabungan. Dengan adanya penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam kebijakan atau program PAMSIMAS.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Apa faktor penentu keberhasilan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil pelaksanaan dari berlangsungnya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penentu keberhasilan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik pada tataran teoritis akademis ataupun pada hal praktis, terutama dalam memberikan masukan berupa alternative kebijakan maupun rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik.

1. Kegunaan Teoritis

Menerapkan dan mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya pada aspek evaluasi dari fenomena yang ada serta sebagai sumbangan peneliti bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi gambaran mengenai program PAMSIMAS di kota Semarang sehingga dapat diketahui pengaruh dari program dengan:

- (1) Memberi masukan kepada pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan pada program PAMSIMAS
- (2) Ditemukannya dampak dari program PAMSIMAS maka akan berguna menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat
- (3) Mengungkapkan kenyataan yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik yang belum seluruhnya memperoleh air bersih yang memadai sehingga dapat menggerakkan pengetahuan dan perspektif pembaca.

1.5 Kerangka Teori

Penulis mengkaji beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran untuk melakukan kegiatan mengenai evaluasi program PAMSIMAS.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

Jurnal	Judul	Penulis	Temuan
Journal of Public Policy and Management Review. 2016. Vol: 1 No. 14-18	Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang	Christ N. C Sagala	Setelah mendapatkan bantuan program PAMSIMAS, masyarakat di Kecamatan Tembalang merasa adanya peningkatan akses terhadap sarana air bersih, dimana sebanyak 57,4% masyarakat mengaku mengatakan mudah mendapatkan air bahkan 23,2% dari partisipan mengatakan sangat mudah. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa sarana yang tersedia cukup sederhana pengoperasiannya hanya dengan stop kran saja, dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan manfaat PAMSIMAS termasuk kategori murah, debit air tidak berkurang pada musim kemarau, selain itu selama pemakaian air juga tidak pernah mengalami gangguan kesehatan. Problematika terhadap pengelolaan PAMSIMAS terjadi setiap musim kemarau terutama warga yang tinggal di daerah yang lebih tinggi sulit mendapatkan air dibandingkan warga yang tinggal ditempat yang lebih rendah. Beberapa kelurahan sudah mengatasi masalah ini

			dengan pembagian/ penggiliran air. Sementara beberapa kelurahan lain belum bisa mengatasinya.
eJournal Jurusan Geografi. 2013. No. 101	Partisipasi Kepala Keluarga Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan Permukiman di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Niken Luluk Cahyani	Partisipasi kepala keluarga dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman di Kelurahan Rowosari dengan responden 96 KK rata-rata tingkat partisipasinya sebesar 69,00% dengan kriteria tingkat partisipasinya tinggi. Perbedaan tingkat partisipasi antar kepala keluarga dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman di Kelurahan Rowosari dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala keluarga dan tingkat kesadaran kepala keluarga dalam mewujudkan sanitasi yang baik. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan dan kesadaran kepala keluarga terhadap perbedaan tingkat partisipasi kepala keluarga di Kelurahan Rowosari sebesar 60,7% sedangkan sisanya 39,3% di pengaruhi oleh faktor lain.
Journal of Public Policy and Management Review. 2015. Vol: 4 No. 3-4	Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang	Stephani Nora Tahalea	Dari kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terjadi beberapa dampak dari teori yang dipakai yaitu evaluasi dampak menurut Samodra Wibawa yaitu dampak Individual, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya pemohon ijin dengan didapatnya pelayanan yang lebih mudah dan cepat. Namun masih sering terjadi kemoloran di dalam penerbitan dokumen ijin menyebabkan masyarakat menjadi kebingungan dan kecewa. Selain itu dampak bagi masyarakat adalah diuntungkan oleh usaha yang memperhatikan kondisi sekitar dan ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar usaha tersebut. Namun, masih ada beberapa pengusaha yang belum memperhatikan lingkungan. Dampak organisasi yaitu masih adanya rasa kurang puas dari masyarakat yang menyebabkan penilaian kinerja BPPT menjadi buruk karena dianggap belum mudah cepat. Dengan adanya kebijakan PPTSP, terjadi perubahan bentuk lembaga dari BKPM dan UPT menjadi terpusat dan berubah menjadi BPPT. Dengan demikian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi maksimal karena masyarakat tidak perlu lagi harus “lari-

			larian” ke banyak dinas untuk mengurus ijin, melainkan dapat dilakukan di satu badan saja yaitu BPPT. Namun koordinasi masih mengalami beberapa kendala terkait dengan adanya perbedaan regulasi dan kurangnya jumlah personel dari tim teknis.
Journal of Public Policy and Management Review.2016 Vol: 5 No. 3	Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali	Anindya Meithasari	Semenjak adanya program PAMSIMAS. Masyarakat Desa Kebongulo mulai sadar akan pentingnya pola PHBS di lingkungan mereka dengan mengubah perilaku tidak sehat sebelumnya, yaitu Buang Air Besar Sembarang Tempat (BABS) menjadi Stop Buang Air Besar (SBS) dan tidak mencuci tangan menjadi perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Program PAMSIMAS berhasil memicu masyarakat untuk menggunakan jamban sehat dan membangun sarana CTPS. Meski demikian, peran program PAMSIMAS masih dalam tahap sosialisasi dan pelatihan. Kurangnya pengawasan terhadap program membuat beberapa akses CTPS lebih sering tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, program PAMSIMAS di Desa Kebongulo telah berhasil menyediakan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan. Pemerintah Desa Kebongulo membangun SPAM desa diluar bantuan program PAMSIMAS untuk menyediakan kebutuhan air minum bersih bagi warganya. namun terdapat kekurangan yaitu tidak berjalannya BPSPAMS Desa Kebongulo mengindikasikan bahwa program PAMSIMAS juga belum mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal. Bantuan dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dalam bentuk kebijakan maupun dana belum dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat Desa Kebongulo. Program PAMSIMAS juga belum maksimal dalam meningkatkan komitmen dan efektifitas pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS hanya sebatas program yang dijalankan tanpa adanya keberlanjutan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.
Journal of Public Policy and	Evaluasi Program Penyediaan	Radiksa Arvian	Pelaksanaan Pamsimas di Kecamatan Tembalang dinilai masih banyak kekurangan, empat dari enam kriteria yang digunakan masih belum bisa

<p>Management Review. 2016.Vol: 5 No. 4</p>	<p>n Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang</p>	<p>Sitranata</p>	<p>dikatakan berhasil, hal ini mengakibatkan kinerja Pamsimas di Kecamatan Tembalang di katakan rendah dan belum optimal. Faktor Penentu Keberhasilan Program: Peneliti dalam mengevaluasi kebijakan Pamsimas di Kecamatan Tembalang melihat dari tiga faktor yaitu, sumber daya, kelembagaan dan komunikasi. Sumber daya disimpulkan kurang, sumber daya manusia pada Pamsimas Kecamatan Tembalang masih kekurangan baik segi kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan sumber daya anggaran sangat terbatas mengingat anggaran yang diberikan dari Kota Semarang juga sangat kecil. Faktor kelembagaan juga belum baik, dikarenakan banyaknya pihak yang terkait dengan Pamsimas. Lembaga tersebut belum berfungsi sepenuhnya seperti yang telah ditetapkan. Diantara ketiga faktor, hanya faktor komunikasi yang sudah diterapkan dengan cukup baik.</p>
<p>Web Konferensi E3S 31, 09033 (2018) No. 2</p>	<p>Literature Study on Community Participation in Community Based Rural Water Supply and Sanitation Programs (Studi Literatur tentang Partisipasi Program Pasokan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)</p>	<p>Siti Robiah Nurbaitil dan Azis Nur Bambang</p>	<p>Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah dalam bentuk uang, pemikiran, energi, materi atau kontribusi material, dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dibagi menjadi faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu karakteristik individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor eksternal yang dapat mendorong atau menghambat partisipasi, antara lain peran pejabat desa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, LSM dan yang menyertainya. tim atau fasilitator.</p>

<p>Dama International Journal of Researches (DIJR). 2017. ISSN: 2343-6743. Vol: 2 No. 1</p>	<p>Community Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIM AS) to Increase Adoption of Permanent Hygienic Latrine (Jamban Sehat Permanen or JSP) through Sanitation Entrepreneurs</p>	<p>Novita Danu Pratiwi, Al Munawir, Isa Ma'rufi</p>	<p>Beberapa masalah dalam implementasi program wirausaha sanitasi di daerah Lumajang. Komponen permintaan yang terkait dengan aspek reda mempengaruhi masyarakat untuk membangun jamban, kemudian pada komponen suplai terkait aspek promosi yang kurang optimal. Peningkatan JSP melalui wirausaha sanitasi oleh pengusaha sanitasi dipengaruhi oleh faktor individu (pengetahuan, sikap & tindakan, dan motivasi), faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi masyarakat di wilayah Lumajang. Pada faktor individu, aspek sikap dan motivasi memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan JSP di Lumajang. Dalam faktor lingkungan, keberadaan badan air dan kemudahan akses terhadap air bersih berperan dalam meningkatkan JSP di Lumajang e. Faktor sosial ekonomi berpengaruh tetapi memiliki kekuatan korelasi yang lebih lemah terhadap peningkatan JSP di Lumajang. Di antara ketiga faktor tersebut, faktor yang paling dominan adalah faktor lingkungan dalam aspek keberadaan badan air, sangat berperan dalam meningkatkan JSP di Lumajang. Program PAMSIMAS sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah yang jauh dari keberadaan badan air di Lumajang.</p>
<p>Pan African Medical Journal – ISSN: 1937-8688.2016 . No. 3</p>	<p>Participatory Evaluation Of Community-Based Water And Sanitation Programs: The Case Of Central Tanzania (Evaluasi Partisipasi air Danberbasis</p>	<p>Michael Paul Schlegel, Aryn Lakhan, Leslie Duncan Saunders, Gian Singh Jhangri</p>	<p>Tingkat cakupan jamban masih rendah. Hal Ini mungkin merupakan gejala dari proyek yang sukses yang dihentikan sebelum pencapaian yang lebih besar dapat direalisasikan sebagai perubahan perilaku yang dapat mempertahankan diri sendiri dapat membutuhkan lebih lama komitmen yang daripada program tiga tahun. Praktek WASH yang sehat masih terhalang, terutama, oleh hambatan non-pengetahuan seperti kenyamanan dan ketidakamanan keuangan.</p>

	Komunitas Programsanitasi: Kasus Tanzania Tengah)		
Journal of Department of Agricultural Economics College of Agriculture, Kansas State University, 2002. No. 1-3	Participatory Evaluation Of Community-Based Water And Sanitation Programs: The Case Of Central Tanzania (Evaluasi Partisipasi air Danberbas is Komunitas Program sanitasi: Kasus Tanzania Tengah)	Aloyce Rm Kaliba	Teknologi air yang diadopsi di Wilayah Singida tidak menyelesaikan masalah kelangkaan air di musim kemarau, apalagi masalah kualitas air. Diperlukan pendekatan dan visi baru untuk memberikan solusi jangka panjang dan langgeng untuk masalah ini. Ketergantungan pada sumur dangkal tampaknya tidak berkelanjutan. Di kedua wilayah, partisipasi perempuan di dunia yang didominasi laki-laki, terbatas. Diperlukan pendekatan yang lebih sensitif jender di kedua wilayah untuk partisipasi perempuan yang efektif dalam semua kegiatan proyek (yaitu keseluruhan siklus proyek). Ketergantungan pada pertemuan desa sebagai alat untuk melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan tidak berjalan. Konsultasi kelompok atau individu diperlukan untuk mendorong partisipasi perempuan terutama dalam manajemen proyek operasi.
Journal of Water Alternatives Vol : 6. No. 385	The Impact of Support to Community-Based Rural Water Service Providers: Evidence from Colombia (Dampak Dukungan	Stef Smits , Johnny Rojas dan Paola Tamayo	Hanya sekitar setengah sistem air yang disurvei memperoleh apa yang dapat dianggap sebagai skor yang dapat diterima untuk tingkat layanan yang mereka sediakan, dan juga hanya sekitar setengah dari penyedia layanan yang bekerja secara memadai dalam tanggung jawab organisasi internal, administrasi dan O & M mereka. Banyak penyedia layanan tidak memiliki informasi mengenai karakteristik layanan utama seperti kualitas air, yang dalam metode penilaian yang dipilih, secara otomatis mengarah ke skor rendah. Di Honduras, hanya sekitar 40% dari penyedia layanan mencetak skala A (pada skala dari A hingga D, dengan A menjadi tingkat kinerja

	untuk Penyedia Layanan Air Pedesaan Berbasis Masyarakat	tertinggi, dan D terendah). Frekuensi dukungan ditemukan menjadi salah satu faktor: penyedia layanan yang menerima dukungan lebih teratur berkinerja lebih baik. Selain itu, kapasitas institusional dari agen pendukung tampaknya penting, sebagaimana diukur oleh variabel seperti memiliki mandat yang jelas dan struktur kelembagaan, metodologi kerja dan kemungkinan menawarkan portofolio penuh kegiatan dukungan, meskipun tidak ada yang signifikan secara statistik.
--	---	--

Program perbaikan sanitasi lingkungan Niken dalam penelitian Luluk Cahyani bertujuan bertujuan untuk memperbaiki sanitasi yang ada di Kelurahan Rowosari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi kepala keluarga dalam perbaikan sanitasi lingkungan dan mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi di Kelurahan Rowosari. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa tingkat partisipasi kepala keluarga termasuk tinggi. Ada dua faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan dan tingkat kesadaran kepala keluarga dalam mewujudkan sanitasi yang baik. Maka program yang di laksanakan bisa dikatakan berhasil karena salah satu pendorong keberhasilan suatu program adalah dukungan dan partisipasi masyarakat.

Septiani Nora menyediakan beberapa teori evaluasi dampak dalam penelitiannya yaitu menurut Anderson Menurut Anderson menurut Langbein, dan menurut Samodra Wibawa. Namun, beliau memakai teori samodra dalam penelitiannya dengan tujuan untuk mengetahui apa dampak PPTSP, baik aspek yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari individu, organisasi, institusi dan sistem sosial.

Christ melakukan penelitian untuk mengetahui dampak program PAMSIMAS dengan melihat dari beberapa fenomena penelitian. Pertama yaitu, Pelaksanaan Kegiatan dan Pengawasan, yang terdiri dari pelatihan/Sosialisasi Program ditingkat masyarakat, pembangunan konstruksi sarana air minum di masyarakat tahap persiapan dan pelaksanaan, kegiatan Kesenambungan dan dampak program dan pelatihan dan pelaksanaan kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kedua, yaitu pengelolaan (menerus dan berkala) yang terdiri dari pembentukan badan pengelola, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana air, dan kegiatan kesinambungan dan dampak program. Melalui evaluasi yang dilakukan pada masing-masing fenomena dapat disimpulkan bahwa program PAMSIMAS di Kecamatan Tembalang memberikan dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Tembalang.

Anindya Meithasar melakukan evaluasi terhadap program PAMSIMAS dengan menggunakan Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn mencakup enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, resposivitas, ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program Pamsimas di Desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, ada perubahan PHBS di masyarakat, meskipun program PAMSIMAS masih memiliki peran yang minimal. Peran PAMSIMAS dalam meningkatkan PHBS hanya sampai tahap sosialisasi. Sementara perubahan kondisi lingkungan, masih memiliki kekurangan dalam hal partisipasi masyarakat, institusi lokal dan komitmen pemerintah yang mempengaruhi program PAMSIMAS di desa Kebongulo. Sama dengan penelitian oleh Radiksa Arvian Sitranata yang melakukan evaluasi program

PAMSIMAS menggunakan teori William N. Dunn. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAMSIMAS di Kecamatan Tembalang sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi. Tetapi masih ditemui kekurangan, seperti kurang meratanya pembangunan tower air dan perpipaan PAMSIMAS, selain tidak merata masih banyak warga miskin yang masih belum dapat mendapatkan PAMSIMAS.

Siti Robiah melakukan evaluasi terhadap program PAMSIMAS dengan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat, antara lain dengan melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam program dimana dalam pelaksanaannya tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang terdiri dari Partisipasi dalam tahap perencanaan (tahap perencanaan ide), Partisipasi dalam tahap implementasi (tahap implementasi) dan Partisipasi dalam pemanfaatan. Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan partisipasi masyarakat di dua desa penerima PAMSIMAS yang menerima Insentif Hibah Desa (HID) dan mereka yang tidak menerima HID, ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan partisipasi di desa-desa HID adalah optimal karena masyarakat yang kuat. Karakteristik dan berpengaruh dalam setiap tahapan program sehingga membentuk kekuatan bersama untuk membangun dan menargetkan keberhasilan program Pamsimas dapat lebih mudah dicapai, dan tingkat partisipasi dalam tahap manajemen telah mencapai tingkat kontrol penuh. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah dalam bentuk uang, pemikiran, energi, materi atau kontribusi material, dan pengambilan keputusan.

Dalam Novita Danu Pratiwi dkk, Lumajang adalah salah satu daerah yang menerima dukungan dana dari program PAMSIMAS, menerapkan kebersihan sanitasi total (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, atau STBM) secara aktif dan intensif. Program STBM diperkuat dengan pelaksanaan program wirausaha sanitasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pasokan sanitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan adopsi jamban sehat permanen (JSP) pada masyarakat melalui wirausaha sanitasi di Kabupaten Lumajang, sehingga proses perubahan ke lingkungan Open Defecation Free (ODF). Faktor tersebut adalah faktor individu (pengetahuan, sikap & tindakan, dan motivasi), faktor lingkungan dan faktor sosial ekonomi masyarakat. Beberapa masalah dalam implementasi program wirausaha sanitasi di daerah Lumajang. Komponen permintaan yang terkait dengan aspek reda mempengaruhi masyarakat untuk membangun jamban, kemudian pada komponen suplai terkait aspek promosi yang kurang optimal. Dalam hal itu program PAMSIMAS sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah yang jauh dari keberadaan badan air di Lumajang.

Michael Paul Schlegelmilch dkk mengevaluasi dampak air dan sanitasi yaitu Program Perbaikan Sombeza (SWASIP) di Provinsi Coast, Kenya. SWASIP adalah proyek gabungan antara Aga Khan University Departemen Kesehatan Masyarakat di Mombasa dan oleh pesisir bentuk Program Dukungan Pedesaan, dari Aga Khan Foundation, Afrika Timur. SWASIP memiliki tiga komponen program utama. Pertama, program ini membangun infrastruktur air dan sanitasi di sekolah dan masyarakat seperti penampungan air di atap, blok jamban, tempat tangan

kebersihan, waduk pertanian kecil, keran publik dan masyarakat saluran pipa. Kedua, program ini memberikan kesehatan dan kebersihan pendidikan promosikepada masyarakat dan sekolah, menggunakan metode Community Led Total Sanitation (CLTS), yang telah diadopsi oleh lebih dari 60 negara di seluruh dunia sebagai sarana utama untuk meningkatkan sanitasi di masyarakat pedesaan. CLTS bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya sanitasi dan kebersihan dan menghilangkan buang air besar sembarangan. Dalam pelaksanaan program terjadi peningkatan yang signifikan secara statistik yaitu akses jamban di rumah, mencuci tangan setelah buang air besar, merawat air minum rumah tangga mereka dan rata-rata waktu untuk mengambil air di musim kemarau. Namun, penelitian ini juga mengamati penurunan yang signifikan dalam proporsi responden yang mencuci tangan mereka sebelum menyiapkan makanan mereka, atau memberi makan anak-anak mereka, dan setelah menghadiri anak yang buang air besar. Selain itu, terdapat juga kesenjangan pengetahuan dalam perilaku WASH. Program SWASIP berkontribusi pada perbaikan, namun permasalahan yang terjadi adalah praktek WASH yang sehat masih terhalang, terutama, oleh hambatan non-pengetahuan seperti kenyamanan dan ketidakamanan keuangan.

Aloyce Rm Kaliba dalam penelitiannya evaluasi tindak lanjut dari dua proyek pasokan air di Central Tanzania. Evaluasi partisipatif menjadi alat penting untuk membantu mencapai tujuan yang ditetapkan dan merupakan bagian integral dari keseluruhan pemantauan dan program. Pemerintah Tanzania menghabiskan sejumlah besar uang dalam mengembangkan proyek- proyek air berbasis pedesaan untuk mengatasi masalah pasokan air. Proyek-proyek yang sedang berlangsung

dilakukan dengan pemerintah yang memberikan bantuan teknis, dengan LSM yang menyediakan kebutuhan modal awal, biaya overhead dan pengawasan dalam desain dan pelaksanaan proyek. Ketika utilitas air beroperasi, penduduk desa membayar air dari utilitas atau menyumbangkan tahunan biaya air ke dana desa. Diperkirakan bahwa dana desa akan cukup untuk mengoperasikan dan memperluas utilitas berdasarkan kekuatan pasar. Namun, keberhasilan mereka akan bergantung pada masyarakat partisipasi, terutama oleh perempuan. Di daerah pedesaan perempuan menyediakan hampir semua air yang digunakan oleh rumah tangga. Namun, perempuan memiliki partisipasi yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan, dan kebutuhan serta kendala mereka seringkali tidak tercermin dalam proses pembuatan kebijakan. Terlepas dari partisipasi masyarakat, keberadaan pasar air yang efisien sangat penting untuk pasokan air yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya air. Dan yang cukup harus dihasilkan untuk memenuhi biaya overhead dan persyaratan investasi.

Stef Smits dkk dalam penelitiannya menyajikan hasil penelitian tentang dukungan untuk penyedia layanan air berbasis masyarakat di Kolombia untuk keberlanjutan pasokan air pedesaan, termasuk analisis kuantitatif dampak dari berbagai agen pendukung pada tingkat layanan, kinerja penyedia layanan dan fungsionalitas aset infrastruktur. Dalam penelitiannya menggunakan metodologi yaitu hubungan antara karakterisasi dari tujuh agen pendukung yang berbeda dan kinerjanya, analisis tingkat layanan, kinerja penyedia layanan dan fungsionalitas. Ini menentukan bahwa kota bertanggung jawab untuk memastikan penyampaian layanan, tetapi penyedia layanan berbasis komunitas (kotamadya, swasta atau

campuran) bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan aktual (O & M) sistem dan administrasi layanan. Hasil yang ditemukan bahwa setengah dari penyedia layanan yang bekerja secara memadai dalam tanggung jawab organisasi internal, administrasi dan O & M tidak memiliki informasi mengenai karakteristik layanan utama seperti kualitas air, yang dalam metode penilaian yang dipilih, secara otomatis dan tidak ada efek yang jelas antara dukungan dan tingkat layanan yang diterima pengguna atau status aset. Makalah ini juga menyimpulkan bahwa ada ruang lingkup untuk meningkatkan efektivitas agen pendukung, dengan faktor-faktor utama yang diidentifikasi yang menjelaskan keefektifan itu. Faktor-faktor kunci ini adalah frekuensi dukungan, kapasitas institusional dari agen pendukung dan penargetan dukungan untuk berbagai jenis komunitas.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa program untuk penyediaan air minum dan sanitasi sudah diterapkan di beberapa negara dengan nama atau bentuk program yang berbeda. Kesulitan dalam pelaksanaan juga berbeda setiap negara. Sebagian besar dikarenakan kurangnya komitmen dan partisipasi dari pihak pelaksana dan masyarakat, serta dukungan pemerintah dalam bentuk dana. Dalam penelitian sebelumnya melakukan evaluasi mengevaluasi menggunakan teori William N. Dunn, Samodra Wibawa dan teori lainnya. Jadi, dapat dilihat persamaan penelitian ini adalah adanya program penyediaan air minum dan sanitasi untuk mengatasi masalah kehidupan masyarakat, namun perbedaannya adalah setiap masalah yang terjadi pada masing- masing penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memiliki pembeda dalam melakukan evaluasi program PAMSIMAS yaitu dengan menggunakan teori William N. Dunn yang

untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam program PAMSIMAS dan menggunakan teori George C Edwards III dalam mendeskripsikan apa saja faktor yang mempengaruhi program PAMSIMAS di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.5.2 Administrasi Publik

Keban dalam bukunya menyatakan pengertian administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, melakukan implementasi dan mengelola keputusan- keputusan dalam kebijakan publik. Mereka menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Menurut Dwight Waldo, memandang Administrasi Publik sebagai suatu manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Anindya Meithasari,2015: 3)

McCurdy (Keban,2008: 5-6) berpendapat bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsip untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan administratif tetapi juga persoalan politik.

Dalam buku keban menurut Barton & Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Nigro & Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara- cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nicholas Henry memberi batasan bahwa administrasi adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek- praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat.

Defenisi administrasi menurut C.T. Goodsell (Yeremias T Keban. 2008:8), dilihat sebagai upaya menghasilkan pemerintahan yang terintegrasi dimana semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik di integrasikan berdasarkan nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keterandalan, transparansi, keterlibatan dan integritas agar dapat dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Edward H. Litchfield Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam- macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga- tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin. Menurut Praduji Atmosudirdjo, administrasi publik adalah dari negara sebagai

organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan- tujuan yang bersifat kenegaraan. Menurut Arifin Abdulrachman Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Selanjutnya Dwight Waldo mengartikan Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig berpendapat bahwa Administrasi Publik adalah kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Menurut George J. Gordon, Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Selain itu Owen Hughes (2004: 23) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi akademik tentang sektor publik. Dalam hubungan hubungan dengan pengertian ini administrasi publik dianggap sebagai manajemen pengembangan teknologi modern menuju good governance. Defenisi ini dipengaruhi oleh gerakan reformasi administrasi publik yang dikenal dengan nama New Public Management (NPM).

Dalam buku Keban (2008: 10-11), Ruang lingkup suatu administrasi publik salah satunya meliputi dimensi kebijakan dan manajemen. Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan ini sangat penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Sedangkan dimensi manajemen berkenanan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan

publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen.

Disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu usaha bekerjasama antara pemerintah masyarakat dengan swasta untuk mengatur urusan publik. Urusan Publik mengenai pembuatan kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan publik yang berprinsip *good governance*. Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak swasta untuk menciptakan kerjasama yang baik guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Administrasi Publik memiliki tugas untuk menanggapi sesuatu permasalahan baik dalam pengembangan ilmu maupun kemajuan hidup. Dengan kemajuan hidup yang semakin berkembang maka administrasi publik memiliki paradigma. Paradigma adalah teori dasar atau cara pandang yang dilandasi nilai-nilai tertentu atau pendekatan yang dapat dipergunakan para teoritis dan praktisi dalam menyelesaikan segala permasalahan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam buku Keban (2008:3134), Thomas S.Huhn mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

- a. Paradigma 1, Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926) Untuk menandai periode ini adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Penekanan Paradigma I adalah pada lokus (tempat) di mana administrasi negara seharusnya berad. Goodnow dan para pengikutnya

berpendapat administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan. Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatian terhadap kebijakan dari kehendak rakyat. Pemisah administrasi dan politik dimanifestasikan oleh pemisah antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, badan eksekutif yang mengimplementasikan kehendak rakyat, yudikatif membantu legislatif menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Ungkapan yang menggambarkan perbedaan antara politik dan administrasi ini adalah “tidak ada cara bagi anggota partai republik untuk membangun jalan”. Penyebabnya adalah hanya akan ada satu cara “yang sah” mengembangkan tarmac- yaitu dengan pengaturan rencana secara administratif.

Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik/administrasi yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai/fakta yang berhubungan. Implikasi yang tidak kalah pentingnya dari tahap pemusatan lokus ini adalah tertutupnya administrasi negara ini dari bidang-bidang lainnya seperti administrasi negara, yang mempunyai konsekuensi yang patut disayangkan pada waktu bidang ini mencapai keberhasilan dalam usaha mencari wujud organisasi.

- b. Paradigma 2, Prinsip – Prinsip Administrasi Negara (1927-1937). Fokus bidang ini yaitu keahlian dalam bentuk prinsip- prinsip administrasi ini bertambah luas. Lokus administrasi negara berlaku di manapun, karena prinsip adalah tetap prinsip, dan administrasi adalah tetap administrasi, setidaknya menurut persepsi Paradigma II ini. Literatur yang paling terkemuka

adalah yang ditulis oleh Frederick W. Taylor, *Principles of Scientific Management* dan berbagai karya Frank dan Lilian Gilberth. Sedangkan bila dihubungkan dengan konsep, jelas bahwa manajemen ilmiah kurang mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara selama tahap ini. Hal ini disebabkan manajemen ilmiah memfokuskan perhatian pada pegawai-pegawai organisasi pada tingkat yang lebih rendah. "Tingginya kekolotan" sebagaimana hal ini sering disebut dari administrasi negara ditandai oleh penerbitan buku Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick, *Papers on the Science of Administration* pada 1937. Gulick dan Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi kepada para meahasiswanya dalam anagram POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Direckting, Coordinating Reporting dan Budgeting).

- c. Paradigma 3, Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Sebagai akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharunya kembali penentuan lokus -yaitu birokrasi pemerintah – tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya. Pendek kata; tahap penentuan ketiga ini sebagian besar merupakan usaha menetapkan kembali kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik.

Ada dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi ketegangan antara para ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik secara berangsur-angsur: peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, perbandingan dan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang

surut sebagai sub-bidang administrasi negara. Administrasi negara lintas budaya (*cross-cultural public administration*) yang disebut juga pendekatan komparatif, merupakan bidang baru dari administrasi negara. Perbandingan administrasi negara, sebagaimana diterangkan Ferrel Heady, memusatkan pada lima "permasalahan motivasi" sebagai kegiatan ilmiah; pencarian teori; dorongan bagi aplikasi praktis; sumbangan bagi perluasan perbandingan politik; perlunya peneliti yang terlatih dalam tradisi hukum administrasi; dan analisa perbandingan berbagai berbagai masalah administrasi yang ada. Administrasi negara mempunyai dua perbedaan, dengan masing-masing mempunyai kajian perbandingan sub-bidangnya.

- d. Paradigma 4, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970). Istilah ilmu administrasi disini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Sebagai paradigma, ilmu administrasi menyajikan suatu fokus, bukan lokus. Ia menawarkan teknik, seringkali tekniknya sangat canggih, yang menurut keahlian dan spesialisasi, tapi untuk bidang apa keahlian tersebut harus diterapkan tidak dijelaskan.

Sebagaimana pada paradigma 2, administrasi adalah administrasi dimanapun ia ditemui; fokus lebih diperhatikan daripada lokus. Pada awal tahun 1960-an, "Pengembangan Organisasi" makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Pengembangan organisasi sebagai sebuah ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai: "demokrasi" birokrasi, baik negara maupun swasta, dan swa-aktualisasi para anggota perorangan dari organisasi. Karena nilai-nilai inilah Pengembangan Organisasi

di pandang generasi muda ahli administrasi negara sebagai tawaran bidang riset yang sangat cocok dalam kerangka ilmu administrasi. Jika ilmu administrasi itu sendiri dianggap sebagai sebuah paradigma, maka administrasi negarapun akan berubah. Para ahli administrasi negara terpaksa menguasai lebih banyak teknologi manajemen agar mereka bisa lebih memahaminya dalam konteks pemerintahan. Ini akan menyingkirkan banyak pertimbangan nilai (kecuali nilai efisiensi ekonomi) sehingga para ahli itu pun mulai berfikir secara filosofis (bukan lahir secara institusional) mengenai arti sesungguhnya kata negara dari administrasi negara.

- e. Paradigma 5, Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970an)
Belum ada fokus bidang studi yang bisa disebut "ilmu administrasi yang murni". Yang ada adalah teori organisasi yang selama dua setengah dasawarsa terakhir memuaskannya perilaku orang-orang di dalamnya dan mengapa demikian, serta bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Sedikit saja kemajuan dalam menggambarkan lokus dari bidang studi tersebut, atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umu, urusan umum dan "penentuan kebijakan umum" bagi para ahli administrasi negara. Meskipun begitu, bidang ini merupakan faktor-faktor sosial fundamental tertentu yang khas bagi negara-negara terbelakang, sebagai lokusnya. Administrasi negara semakin menonjol bukan hanya karena diakui kalangan universitas sebagai bidang akademik yang tersendiri (di banyak tempat, ilmu ini tak hanya diajarkan sebagai sebuah jurusan, tapi bahkan berupa sebuah perguruan tinggi tersendiri), tapi bidang itu sendiri merupakan getaran semangat akademik, dan

merupakan isyarat awal dari perubahan sosial. Jika negara harus ditangani dengan baik, menurut Rektor Harvard, Bok, maka pihak universitas harus berperan langsung dalam proses pembentukan sikap dan pemikiran para abdi negara tersebut.

Dalam beberapa paradigma, peneliti memakai ke Paradigma 5 yaitu Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara dengan dengan lokus di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Paradigma sangat berguna untuk para administrator. Paradigma administrasi publik membantu para administrator dalam merumuskan kebijakan. Paradigma yang semakin berkembang kan tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik

1.5.4 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik sangat bervariasi yang di kembangkan oleh beberapa ahli. Harold D.Laswell dan Ambraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai nilai dan praktik praktif yang terarah (Sri Suwitri, 2008 :6)

Menurut Thomas R. Dye (Radiksa, 2016 : 5), kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*). Sedangkan Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya- sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. A.Hoogerwerf juga merumuskan kebijakan publik

sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

Carl J. Friedrich (Sri Suwitri 2008 : 6) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu sebagai berikut:

- a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Roro dalam bukunya (2009:2) menyebutkan kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan, untuk melaksanakannya, dan dengan harapan dapat tercapai tujuan dari kebijakan tersebut, maka perlu kiranya kebijaksanaan itu di terjemahkan dalam bentuk yang konkrit. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dituangkan dalam tindakan-tindakan nyata yaitu dengan tujuan menjamin kepentingan umum

semaksimal mungkin, ditetapkan berdasar prosedur yang berlaku, dan didorong oleh keinginan untuk menghindari, pertentangan yang deskriptif. Edwards III dan Ira Sharkansky (Anindya, 2016: 3). Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program- program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

Jones (Abdul Wahab, 2015: 9) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang- orang baik dipihak mereka yang mematuhi. Knopfel dan kawan- kawan (2007) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan- keputusan atau tindakan- tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/ pemerintah maupun privat/ swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang secara politis di defenisikan sebagai masalah publik. Eystone juga berpendapat bahwa kebijakan publik adalah antara hubungan yang berlangsung diantara unit/ satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Sedangkan Wilson (2006) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah tindakan- tindakan, tujuan- tujuan dan pernyataan- pernyataan pemerintah mengenai masalah- masalah tertentu, langkah- langkah yang telah/ sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan- penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

W.I Jenkins (Abdul Wahab, 2015: 15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta

cara- cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan- keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas- batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Selanjutnya, Chief J.O. Udoji mendefenisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Lemieux juga mengartikan kebijakan publik adalah produk aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah- masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor- aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Kemudian Lemieux mengatakan kebijakan publik adalah produk aktivitas- aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah- masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor- aktor politik yang hubungannya terstruktur.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat tersebut adalah kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan untuk mengatur kehidupan bersama sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang menjamin kepentingan umum.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan maka diperlukanlah sebuah evaluasi kebijakan. Selain itu dengan evaluasi, dapat mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

1.5.5 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi dapat memberikan pendekatan yang banyak dalam memberikan informasi. Dalam suatu kebijakan penting dilakukan evaluasi karena tidak semua program kebijakan publik dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, evaluasi sangat membantu dalam perbaikan dan pengembangan suatu kebijakan. Adapun standard menurut Lee J. Cronbach adalah yang digunakan untuk melakukan evaluasi dengan memberikan dampak yang positif terhadap suatu program tersebut.

Macolm, Provus, pencetus Discrepancy Evaluation pada tahun 1971 mengartikan evaluasi sebagai suatu perbedaan yang terdapat dalam suatu standar dengan tujuan untuk mengetahui adanya selisih diantaranya. Sedangkan Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir (Widodo,2008: 112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Pengertian lain menurut Lester dan Steward, evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi- konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan itu, tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Briant & White (Samodra, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi

kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.

Dalam buku Firyal dan Widya, Parsons menjelaskan studi evaluasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan publik dapat ditaksirkan, diaudit, dinilai dan dikontrol. Studi tentang evaluasi kebijakan terdiri dari menilai apakah kebijakan publik mencapai tujuan.

Sesuai dalam buku Farida Yusuf, Evaluasi sendiri mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif yaitu berfungsi sebagai perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, produk dan sebagainya) dan fungsi sumatif, yaitu evaluasi dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban, keterangan seleksi atau lanjutan. Jadi Evaluasi diharapkan dapat membantu dapat membantu pengembangan implementasi, kebutuhan dalam suatu program, perbaikan program, sebagai pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.

Sementara itu, Anderson berpendapat evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan (Stephani, 2015: 3).

Jones pada buku M Ridha Suaib, mengartikan evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil- hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan- perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik- teknik pengukuran dan metode analisisnya.

Kesimpulan dari pengertian diatas, evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses penilaian atau pengukuran hasil suatu kebijakan publik kemudian menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan serta memberi alternatif solusi untuk perbaikan dari kebijakan tersebut.

1.5.5.1 Tujuan Evaluasi

Dalam buku Subarsono (2005: 120), Evaluasi memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi,

dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang . Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik

Sedangkan menurut Samodra Wibawa (1994: 13-14), evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain.

1.5.5.3 Fungsi Evaluasi

Menurut William N. Dunn (Anindya, 2016:3), ada beberapa fungsi dari evaluasi, pertama yaitu evaluasi memberikan informasi yang jelas dan dipercaya terkait dengan kinerja kebijakan, yang artian sebagaimana hasil yang dapat dicapai dari tindakan publik apakah nantinya memperbaiki, melanjutkan, atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan. Kedua, evaluasi memberi klarifikasi dan kritik terhadap nilai- nilai yang menjadi dasar pemilihan tujuan dan target. Dalam hal ini adalah mempertanyakan seberapa bisa nilai- nilai dapat mengoperasimkan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberikan sumbangan terhadap aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Dan evaluasi juga dapat memberikan beberapa alternatif kebijakan guna menyelesaikan suatu masalah dengan mengganti kebijakan yang sebelumnya.

1.5.5.4 Kriteria Evaluasi

Dalam menghasilkan informasi mengenai hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program, maka diperlukan analisis menggunakan kriteria evaluasi untuk mengevaluasi hasil- hasil kebijakan tersebut.

Tabel 1. 6 Kriteria Evaluasi

NO	Kriteria	Pertanyaan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok- kelompok yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok- kelompok tertentu
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar- benar berguna atau bernilai?

Sumber : Dunn (Subarsono, 2005: 126)

a. Efektivitas

Menurut William N.Dunn (Subarsono, 2005: 126), Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan sudah mencapai yang telah ditetapkan. Menurut Winarno (2007: 184), efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila pencapaian

tujuan dari kebijakan semakin besar atau meningkat maka semakin besar pula efektivitasnya. Apabila setelah pelaksanaan suatu kebijakan ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakala suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, ada kala berhasil melalui proses panjang.

b. Efisiensi

Menurut William N.Dunn (Subarsono, 2005: 126), Efisiensi berkenaan dengan banyaknya usaha yang dikorbankan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Mulyadi (2007:63) mengemukakan efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, biaya, tenaga.

c. Kecukupan

Menurut William N.Dunn (Subarsono, 2005: 126), Kecukupan berkenaan dengan bagaimana suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil sekaligus dapat memecahkan masalah- masalah yang ada. Menurut Winarno (2007: 186), Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

d. Perataan

Menurut William N.Dunn (Subarsono, 2005: 126), Perataan dalam hal ini membahas bagaimana usaha memberikan hasil *output* yang adil atau merata kepada tiap orang tanpa memandang latar belakang ataupun hal lain. Menurut Winarno (2007:187), Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.

Kriteria perataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu kebijakan atau program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat merata.

e. Responsivitas

Menurut William N.Dunn (Subarsono, 2005: 126), Responsivitas berkenaan dengan apakah usaha yang dilakukan memberi efek puas dalam dan menjawab pertanyaan dalam memenuhi kebutuhan kelompok- kelompok. Menurut Winarno (2007 : 189), Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan suatu kebijakan atau program

dapat dilihat melalui tanggapan sasaran yang menanggapi pelaksanaan kebijakan dengan memprediksi dahulu pengaruh kebijakan atau tanggapan setelah dampak kebijakan yang telah dirasakan. Tanggapan sasaran dapat diberikan dalam bentuk dukungan atau berupa penolakan.

f. Ketepatan

Menurut William N.Dunn (Subarsono, 2005: 126), Ketepatan berkenaan dengan apakah tujuan dari usaha tersebut dapat berguna atau bermanfaat bagi kelompok- kelompok ataupun berguna bagi pelaksana itu sendiri.

1.5.5.5 Tipe- Tipe Evaluasi

Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:74) menyebut empat program berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperolehnya seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 7 Jenis Evaluasi Finsterbusch dan Motz

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran		Kelompok Kontrol	Informasi yang diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single Program after –Only</i>	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single Program before-after</i>	Ya	Tidak	Tidak ada	Perubahan Kelompok sasaran
<i>Comparative after-only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan bukan sasaran
<i>Comparative beforer-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran

Sumber : Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994:74)

Single program after-only merujuk bahwa evaluasi dilakukan hanya mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran pada saat kebijakan selesai dilakukan. Penelitian ini dianggap sangat lemah karena hanya deskriptif, dan tidak mampu memberikan kenyataan yang lebih bahwa kebijakan benar-benar telah memberikan dampak bagi kelompok sasaran. *Single program before-after* menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran tanpa menggunakan kelompok pembanding, dimana kekurangan desain ini adalah lemahnya argumentasi apakah kelompok diluar yang diintervensi tidak memiliki hasil atau dampak seperti kelompok sasaran. Ketiga adalah *comparative after only* dimana evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkannya dengan kondisi kelompok pembanding. Desain penelitian ini dikatakan baik karena telah memberikan informasi apakah ada perbedaan kondisi kelompok yang diintervensi kebijakan dengan yang tidak. Kelemahan desain penelitian ini adalah bahwa desain penelitian ini tidak dapat memastikan berapa derajat perubahan dari hasil intervensi kebijakan. Desain yang terakhir adalah *Comparative Before After* Menunjuk pada evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi. Desain ini disebut sebagai desain yang terbaik, selain dapat mengukur tingkat perubahan selama dan sesudah, juga dapat dipastikan bahwa hasil dan dampak kebijakan tersebut adalah benar benar hasil dari kinerja kebijakan.

1.5.6 Evaluasi Program

Menurut Wirawan, program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan,

menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat. Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan; dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai tentang strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan evaluasi program adalah proses untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan yang dimana sebagai bentuk dari pelaksanaa kebijakan

1.5.7 Evaluasi Program PAMSIMAS

Sebelumnya program PAMSIMAS I (2008–2012), II (2013–2016) sudah berjalan dan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 dilanjut dengan Program PAMSIMAS III. Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah Indonesia melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Universal Access 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. PAMSIMAS III merupakan instrumen pelaksanaan 2 agenda nasional yang dirancang untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu:

- 1) Air Bersih untuk Rakyat dan
- 2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sesuai pada buku PAMSIMAS yang berjudul Kita Berbeda didalam PAMSIMAS, Program PAMSIMAS III berupaya kolaborasi dengan program-program sejenis (Hibah Air Minum, STBM, Program Dana Desa, dll) dan berencana memperluas lokasi sasaran program yang mencakup seluruh kabupaten di Indonesia.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Evaluasi Program PAMSIMAS bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan program sehingga memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi dan hasil pemantauan, dengan kata lain evaluasi program berguna untuk melihat bagaimana hasil pelaksanaan program PAMSIMAS yang dilakukan apakah telah memberikan dampak sesuai harapan program yang ditetapkan. Kemudian dengan menganalisis faktor pendorong penghambat pelaksanaan maka dapat dilakukan suatu perbaikan demi mencapai hasil yang lebih baik lagi. Evaluasi Program PAMSIMAS memiliki prinsip-prinsip dalam

pelaksanaanya yakni partisipatif artinya Semua pelaku program terutama masyarakat, fasilitator, dan konsultan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kedua, transparan artinya evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan hasilnya mudah diakses semua pihak. Ketiga, akurat yakni Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.8 Faktor Penentu keberhasilan program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Dalam buku Subarsono (2005: 89- 92), George C Edwards III menungkapkan faktor yang mendorong berhasilnya suatu kebijakan adalah:

1. Komunikasi

Dalam melaksanakan kebijakan maka perlu komunikasi yang baik karena jika tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

2. Sumberdaya

Dalam hal ini dibutuhkan beberapa sumberdaya yang mencukupi, karena jika implementor kekurangan sumberdaya maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut seperti sumberdaya manusia yaitu kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3. Disposisi

Disposisi dimaksud adalah watak dan karakteristik para implementor, seperti komitmen, kejujuran dan bersifat demokratis. Apabila Implementor

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh si pembuat kebijakan, dan jika disposisi tidak baik maka akan menghasilkan kebijakan yang tidak yang efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan sangat penting dalam suatu organisasi. Contohnya adalah SOP (*Standard operating procedures*) yang dijadikan sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi yang panjang akan menyebabkan pengawasan yang lemah dan terjadi rade- tape, yakni prosedur yang rumit dan kompleks dan secara langsung menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

1.6 Fenomena Penelitian

Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah suatu proses penilaian hasil pelaksanaan program perbaikan air minum kebutuhan masyarakat dan perbaikan lingkungan sehat yang bertujuan untuk menciptakan hidup sehat dan bersih masyarakat. Proses evaluasi dengan menggambarkan bagaimana hasil pelaksanaan yang ditimbulkan dari program, mengidentifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan program serta memberi alternatif solusi untuk perbaikan dari program.

Adapun fenomena peneliti dalam mengevaluasi Program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

- a. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses air minum yang layak
- b. Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses sanitasi yang layak
- c. Pelaksana dan masyarakat memelihara sarana dan prasarana dalam akses air minum dan sanitasi dengan baik

2. Efisiensi

- a. Realisasi anggaran PAMSIMAS dari APBD Kota Semarang
- b. Penyerapan Anggaran PAMSIMAS dari APBD
- c. Masyarakat mampu mengumpulkan iuran dalam pemakaian sarana dan prasarana yang sudah ada

3. Kecukupan

- a. Semakin banyak orang yang terpenuhi kebutuhan air bersihnya

4. Perataan

- a. Pemerataan PAMSIMAS bagi setiap warga (pria/wanita) terutama yang tergolong kurang mampu

5. Responsivitas

- a. Perubahan pola pikir masyarakat tentang SBS
- b. Perubahan pola pikir masyarakat tentang CTPS
- c. Tanggapan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan

6. Ketepatan

- a. Pembangunan titik PAMSIMAS sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Faktor- faktor penentu keberhasilan merupakan sesuatu yang diamati dan dijadikan ukuran untuk mengetahui sejauh mana Program dipengaruhi beberapa variabel berikut:

1. Komunikasi

- a. Sosialisasi program dan pembentukan kepanitiaan PAMSIMAS
- b. Musyawarah dengan warga dalam penentuan tarif PAMSIMAS

2. Sumberdaya

- a. Efisiensi anggaran yang digunakan dalam program PAMSIMAS
- b. Kualitas SDM Pengelola PAMSIMAS

3. Disposisi

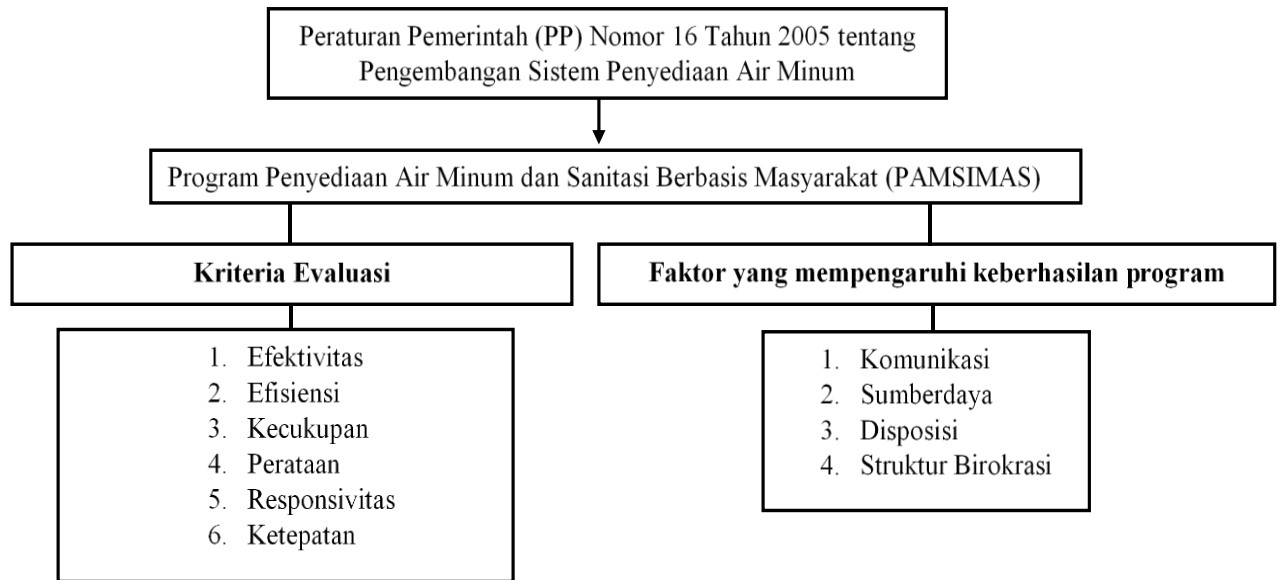
- a. Sikap implementor dalam melaksanakan program PAMSIMAS sesuai dengan kebijakan
- b. Pemahaman implementor terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, perencanaan yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring atau evaluasi sanitasi dalam mewujudkan sasaran program PAMSIMAS

4. Struktur birokrasi

- b. Kegiatan dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PAMSIMAS

1.6.1 Kerangka Berfikir Program

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir Program



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif yang merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu penulis dalam mengungkapkan masalah yang spesifik pada evaluasi Program PAMSIMAS untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dan mengungkap penghambat dan pendorong pelaksanaan program PAMSIMAS.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Situs atau lokasi penelitian Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat terletak di Kelurahan Jabungan yaitu kelurahan yang mendapatkan program PAMSIMAS pada tahun kerja 2010.

1.7.3 Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh key informan yaitu masyarakat Kelurahan Jabungan dan para pelaksana yang paham mengenai Program PAMSIMAS yaitu Ketua Asosiasi AP-SPAMS “Tirta Atlas” Kota Semarang, Pembina dan Fasilitator PAMSIMAS Kecamatan Banyumanik, Ketua BPSPAMS Kelurahan Jabungan, Masyarakat Kelurahan Jabungan.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis antara lain meliputi teks atau tulisan, kata- kata tulisan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial. Data- data seperti foto, statistik dan data angka dilengkapi dengan sumber yang diambil dari arsip resmi PAMSIMAS.

1.7.5 Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data penelitian ini mendapatkan informasi melalui observasi dan wawancara kepada berbagai pihak yang mengetahui tentang PAMSIMAS yaitu Ketua Asosiasi AP-SPAMS “Tirta Atlas” Kota Semarang, Pembina dan Fasilitator PAMSIMAS Kecamatan Banyumanik, Ketua BPSPAMS Kelurahan Jabungan, Masyarakat Kelurahan Jabungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung keterangan sumber data primer. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, buku, dan catatan-catatan, website pamsimas dan sumber- sumber lain yang berkaitan dengan program di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

1.7.6 Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui:

1. Observasi

Menurut Marshall (Sugiyono 2009: 226) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Selanjutnya Nasution bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmu pengetahuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono,2009: 231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya Susan Stainback (Sugiyono 2009: 232) juga mengemukakan bahwa dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik. Dokumen yang dijadikan informasi oleh peneliti adalah berbentuk tulisan, gambar, karya monumental seseorang atau dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian.

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan interpretasi data melalui reduksi dengan mengelompokkan hal-hal pokok, kemudian disajikan dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

1.7.7 Analisis Interpretasi Data

Penelitian ini melakukan proses kegiatan analisis data oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2008: 246), yaitu :

a. Reduksi Data

Pemilahan hal yang pokok dari data lapangan, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan).

b. Penyajian Data

Merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari

data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

1.7.8 Kualitas Data

Dalam memastikan data/ informasi lengkap dan valid serta mempunyai reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin (Moloeng, 2004: 330) membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moloeng, 2004: 330) Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan